

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

UMKM yang memiliki kepanjangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Seperti yang sudah tertuang di dalam UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM pada aturan tersebut dijelaskan bahwa usaha perseorangan yang dapat membantu membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kemudahan perekonomian di saat krisis ekonomi. Dalam perekonomian Indonesia kegiatan usaha tersebut dapat membantu berkontribusi perekonomian negara. UMKM tergolong kedalam sektor riil yang mempunyai daya tahan tinggi terhadap krisis ekonomi.

Di Indonesia merupakan Negara yang masuk dalam anggota G-20. Anggota G-20 merupakan Negara yang tergolong dalam perekonomian besar. Di Indonesia memiliki kegiatan usaha seperti UMKM yang berperan penting dalam membantu perekonomian masyarakat. UMKM di Indonesia juga dianggap penting keberadaannya oleh Pemerintah Indonesia yang dapat mempengaruhi keuangan negara, saat ini dianggap sebagai cara yang ampuh dalam pengentasan kemiskinan. Dari riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar dan menjadi penyebab perkembangan suatu negara pada saat krisis ekonomi. UMKM juga membantu mengurangi angka pengangguran dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan untuk pemuda Indonesia.

Di Indonesia sendiri jumlah UKM (Usaha Kecil Menengah) telah mencapai 90 persen dari jumlah usaha yang ada. Namun, terdapat kendala utama pada UKM selain pada modal yaitu pada pengelolaan keuangan pada UKM karena masih menggunakan pembukuan yang sederhana dan masih mengabaikan standar. Padahal laporan keuangan yang menggunakan standar akuntansi yang berlaku akan membuat laporan keuangan yang akurat dan dapat membantu berkembangnya bisnis secara kuantitatif dan kualitatif.

Dengan adanya kepentingan tersebut, maka IAI atau disebut dengan Ikatan Akuntan Indonesia telah merancang SAK yang dapat digunakan oleh UKM sebagai panduan dalam menggunakan laporan keuangan. Standart Akuntansi dinamakan tersebut dinamakan SAK ETAP. Melatar belakangnya diperlukan SAK ETAP ini karena PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang mengadopsi IFRS (International Financial Reporting Standard) terlalu kompleks jika untuk diterapkan oleh perusahaan kecil menengah (UKM) di Indonesia.(Kholmi,2011)

Pada 1 Januari 2011 SAK ETAP telah ditetapkan secara resmi. Laporan Keuangan menggunakan SAK-ETAP hendaklah membuat pernyataan akurat dan secara penuh sebagai bentuk kepatuhan dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, bahwa SAK-ETAP tidak berlaku untuk perusahaan terkecuali untuk perusahaan yang telah mendapatkan ijin dari SAK-ETAP. Perusahaan besar atau perusahaan go-public pun memiliki standard khusus yang telah ditentukan oleh BAPEPAM, yaitu menggunakan SAK-UMUM yang diadopsi sebagian IFRS.

Manfaat para UKM menggunakan SAK-ETAP bukan hanya sebagai penyusun laporan keuangan yang sederhana dan mudah dipahami, namun ada beberapa manfaat lainnya yang dapat dirasakan oleh para pemilik UKM yang bahkan baru merintis UKM. Karena penyajian laporan keuangannya yang akurat dan praktis untuk diimplementasikan. Namun, di Indonesia sendiri masih banyak UKM yang tidak menggunakan SAK-ETAP, hal itu disebabkan oleh minimnya sosialisasi mengenai SAK-ETAP, karena penyajian laporannya yang dikhawatirkan tidak akurat. Mereka masih tidak mau mengambil resiko untuk mengubah semua kebijakan keunagan yang sudah ada.

Negara Jiran juga memiliki UKM yang sama halnya dengan Indonesia yang dapat membantu perekonomian negara serta dapat membantu mengurangi angka pengangguran masyarakat Malaysia.

Small and Medium Enterprises (SMes) memainkan peran penting dalam perekonomian Malaysia dan dianggap sebagai tulang punggung pengembangan industri di negara tersebut. Di Malaysia, sangat jelas bahwa pengembangan UKM adalah bagian dari upaya untuk merestrukturisasi kegiatan ekonomi di antara kelompok etnis. Strategi Nasional untuk Pengembangan UKM juga diterapkan. Ada upaya sinergis di antara badan-badan pemerintah untuk mengembangkan UKM. Bank Negara Malaysia berperan aktif dalam mendukung dan membiayai.

Dewan Standar Akuntansi Malaysia meluncurkan Standar Pelaporan Entitas Pribadi Malaysia (MPERs) pada tanggal 27 Oktober 2015. MPERs merupakan

kerangka pelaporan keuangan baru untuk entitas swasta yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Malaysia (MASB). Ini menggantikan kerangka Standar Pelaporan Entitas Pribadi (PERS) saat ini.

Pada bulan Februari 2014, MASB mengeluarkan Standar Pelaporan Badan Pribadi Malaysia (MPERS) dan ini menetapkan tonggak baru untuk pelaporan keuangan entitas swasta di Malaysia. IFRS untuk UKM yang dikeluarkan oleh IASB pada bulan Juli 2009. Kerangka pelaporan yang baru, laporan keuangan yang dikenal sebagai Kerangka MPERS, terbukti telah menjadi sejak saat 1 Januari dengan penerapan awal diizinkan.

Tulisan ini hendak menganalisis lebih jauh mengenai Standar Akuntansi Keuangan untuk di Indonesia dan Malaysia. Yang akan dituangkan dalam Tugas Akhir ini yang berjudul “Komparasi Standar Akuntansi pada UKM di Indonesia dan Malaysia”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah tentang latar belakang tersebut yaitu :

1. Bagaimana aturan dalam Standar Akuntansi di Indonesia ?
2. Bagaimana aturan dalam Standar Akuntansi di Malaysia ?
3. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi oleh pengelola UMKM di Indonesia dan Malaysia mengacu SAK ETAP dan MPERS?

### **1.3 Tujuan**

Tujuan dari rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Untuk memahami aturan dalam Standar Akuntansi yang dilakukan oleh UMKM di Indonesia
2. Untuk mengetahui aturan dalam Standar Akuntansi yang dilakukan oleh UMKM di Malaysia
3. Untuk mengetahui penerapan akuntansi yang dilakukan oleh UMKM di Indonesia dan Malaysia, sudah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan MPERs

### **1.4 Manfaat**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu akuntansi dan pengetahuan penerapannya yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Publik (SAK ETAP) dan MPERs pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi penulis untuk terjun langsung di lapangan dan mengetahui perbedaan antara teori dan kondisi yang sebenarnya.